

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA**

**(STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN PANCUR KAB.
REMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

NURKHASANAH

NIM 1505046067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurkhasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurkhasanah
NIM : 1505046067
Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi
Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab.
Rembang)

Dengan ini kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara
tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

Nurudin, SE, MM
NIP. 19900523 201503 1 004

PENGESAHAN

Nama : Nurkhasanah
NIM : 1505046067
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang)

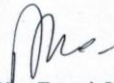
Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat CUMLAUDE, pada tanggal : **22 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (Srata Satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2018/2019


Semarang, 22 Juli 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

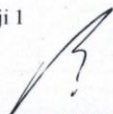
NIP. 19730811 200003 1 004


Prof. Dr. Siti Mujiбатun, M.Ag

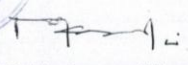
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji 1

Penguji 2


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 19700410 199503 1 001


H. Muchammad Fauzi, SE., MM

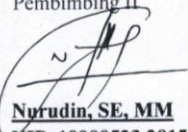
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Siti Mujiбатun, M.Ag

NIP. 19590413 198703 2 001


Nurudin, SE, MM

NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah
(HR. Ahmad)

*“ bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang
mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)
Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*
(Surat At-Taubah, 9:105)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Jakaria dan Ibu Sukarni yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materil dan kesabarannya menunggu terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakakku tercinta Ulfah dan adik-adikku Nur Halimah dan Nur Kholifah yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan suntikan semangat.
3. Kyai, Dosen dan semua guru-guruku yang telah berjasa begitu besar, berkat bimbingan dan doa yang pada akhirnya saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019

Deklarator



Nurkhasanah

1505046067

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: إِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al*-... misalnya القرآن : *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Indonesia sekarang ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di desa kecamatan Pancur kabupaten Rembang).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 75 responden atau pihak pengelola dana desa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Uji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas *Pearson Correlation* dan ujin reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Untuk uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi yang sudah disesuaikan dengan uji F, uji t.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan.

Kata kunci : Kompetensi aparatur, Pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas

ABSTRACT

Nowadays Indonesia prioritized village construction. To create that construction one of the government effort is give village fund that directly taken from APBN (Income and expenditure budget) managed by society independently. The aim of this research is to analyze the influence of the apparatus competency, participation of society and use of information technology on accountability of village fund management (a case study in the district Pancur Rembang regency)

This research is quantitative research with 75 respondents or village fund management apparatus. The data collection obtained by questioner, processed and analized using multiple regression analysis. To obtain the sample in this research, the researcher uses Purposive Sapling method. Quality data test in this research are validity *Pearson Correlation* test and Reliability test using *Cronbach's Alpha*. For hypothesis test is using determination coefficient test. That appropriated by F test , t test.

The result of this research shows that apparatus competency have not positive influence on accountability of village fund. Society participation have not positive influence on accountability of village fund and use of information technology have positive influence on accountability of village fund.

Keyword : Apparatus competency, use of technology information, accountability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Prof.Dr.Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 dan Nurudin, SE,MM selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan perpustakaan universitas yang telah direpotkan selama pembuatan skripsi ini.
7. Kepala Desa di Kecamatan Pancur yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
8. Teman-teman seperjuangan terkhusus Akuntansi Syariah B15 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih kalian telah menjadi keluargaku di tanah rantau. Dimanapun dan kapanpun jangan pernah lupa dan putus silaturahmi.
9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan PP. Daarun Najaah yang selalu memberi doa dan semangat, terimakasih kalian adalah teman berdiskusi yang solid.
10. Dan semua pihak yang belum tercantum dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juli 2019

Nurkhasanah

1505046067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Kompetensi	13
2.1.2 Partisipasi Masyarakat.....	19
2.1.3 Teknologi Informasi	23
2.1.4 Akuntabilitas	27

2.1.5	Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.1.6	Dana Desa	44
2.2	Penelitian Terdahulu.....	46
2.3	Hipotesis	51
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritik.....	55
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Populasi dan Sampel.....	57
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	59
3.4	Variabel dan Indikator Penelitian	61
3.5	Teknis Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum	73
4.2	Deskripsi Data	74
4.3	Analisis Data	80
4.4	Pengujian Hipotesis	88
4.5	Pembahasan Penelitian	93
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran.....	98
5.3	Keterbatasan peneliti	98
5.4	Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	:	Anggaran Dana Desa
Tabel	2.1	:	Penelitian Terdahulu
Tabel	3.1	:	Variabel dan Indikator
Tabel	4.1	:	Distribusi Kuesioner
Tabel	4.2	:	Kategori Jenis Kelamin Responden
Tabel	4.3	:	Kategori Jenjang Pendidikan Responden
Tabel	4.4	:	Mean, Median, Modus Kompetensi Aparatur
Tabel	4.5	:	Mean, Median, Modus Partisipasi Masyarakat
Tabel	4.6	:	Mean, Median, Modus Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tabel	4.7	:	Mean, Median, Modus Akuntabilitas
Tabel	4.8	:	Hasil Uji Validitas
Tabel	4.9	:	Hasil Uji Reliabilitas
Tabel	4.10	:	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tabel	4.11	:	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel	4.12	:	Hasil Uji Multikolinieritas
Tabel	4.13	:	Hasil Regresi
Tabel	4.14	:	Hasil Koefisien Determinasi
Tabel	4.15	:	Hasil Uji F
Tabel	4.16	:	Hasil Uji t

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas

Gambar 4.2 Grafik Normal Plot

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Pengisian Kuesioner
- Lampiran 3 : Jawaban Responden
- Lampiran 4 : Hasil SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri. Kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menggambarkan iktikad Negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah yang bersifat hakiki.¹. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah dan daerah kepada desa yang biasa disebut desentralisasi.

¹ Jan Hoesada, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, h.27.

Diperjelas juga dengan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 bahwa “Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa. Yang mana bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memberi amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa”.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015. UU Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah yang terbagi dalam tiga tahun (2016, 2017, 2018) setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun
2018	Rp 60 Triliun

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id> , 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46,69 Triliun, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 Triliun, dan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 Triliun. Dengan anggaran Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2019. Tahun 2017 dari survey di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.²

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara

² <http://www.kemenkeu.go.id>

transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.³ Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴ Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

³ Chomariyah, et al, *Keuangan Desa Pesisir*, Malang: Inteligensia Media, 2016, h.4.

⁴ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2017, h.133.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.⁵

Untuk mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Dalam pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi

⁵ Larastika Medianti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*. JOM FEB (Volume 1 Edisi 1, Januari-Juni 2018), h.2

kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.⁶

Kabupaten Rembang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 101.408 hektar. Kabupaten Rembang pada tahun 2018 mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai kabupaten pengelola dana desa terbaik, tetapi di tahun tersebut pula baru 17 dari 287 desa yang mencairkan dana tahap satu, masih banyak desa yang terlambat dalam pencairan dana desa dikarenakan belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya.⁷ Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan belum tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kecamatan Pancur merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rembang yang menjadi lokasi penelitian ini akan menerima anggaran berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh Pemerintah. Desa Warugunung, Desa Jeruk, Desa Doropayung, Desa Wuwur, Desa Kalitengah, Desa Kedung dan Desa Johogunung adalah desa-desa yang akan menerima anggaran tersebut, desa tersebut tergolong desa yang tertinggal dan mengalami keterlambatan dalam melaporkan

⁶ Khaeril Wahyu Perdana, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa*, 2018

⁷ mataairradio.com diakses 27 Januari 2019

laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Ini dikarenakan kompetensi aparatur pengelola dana desa dalam memahami pengelolaan dana desa masih rendah. Aparatur yang sebagian banyak hanya lulusan SMA menjadi sorotan yang mengakibatkan terjadi kesalahan administrasi sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana desa, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terjadi penyelewengan dana desa yang jumlahnya relative besar dan kesadaran masyarakat untuk ikut andil terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa juga masih rendah yang menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum tercapai.

Pentingnya akuntabilitas terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan implementasi pemerintah dalam melaksanakan amanah, yang mana pemerintah sebagai agen yang memberi

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Larastika Medianti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris di desa kabupaten Bintan). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel faktor kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel independen pemanfaatan teknologi informasi karena teknologi informasi banyak membantu mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public service*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan,⁸

Penelitian dari Sutrisno tentang Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil penelitiannya menyatakan penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan

⁸ Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011, h.15

pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel pemanfaatan teknologi informasi, adapun perbedaannya terdapat di variabel penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Selain itu ada penelitian dari Ayu Juliastuti tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menyatakan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan**

Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

2. Bagi Stakeholder

Penelitian ini sekiranya juga diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi pelajar khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penulis berharap hasil penelitian ini benar-benar berguna bagi keperluan banyak pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang mengambil garis besar penelitian ini.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa dan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat mudah dipahami skripsi tersusun dalam lima bab yang masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu yang tetap berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran , serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, variable penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian, penyajian data, serta analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Kompetensi

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.⁸

Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *job tasks*. Sedangkan menurut Armstrong, menyatakan bahwa kompetensi adalah dimensi tindakan dari tugas, dimana tindakan tersebut dipakai oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan

⁸ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014, h. 5

dalam bentuk yang berbeda-beda dan tingkatan kinerjanya. Akan tetapi Mc Clelland mengatakan bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu. Namun demikian, pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa kompetensi berhubungan dengan sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang diperolehnya.

2.1.2.1 Kompetensi individu

Tujuan kebutuhan dalam penentuan tingkat atau level kompetensi seseorang hanyalah untuk mengetahui tingkat kinerja orang tersebut apabila ia akan melakukan suatu pekerjaan, apakah hasilnya mereka nanti termasuk dalam kategori tinggi atau dibawah rata-rata. Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan pekerjaan (sudah bekerja). Sebaliknya, apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula. Dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini:⁹

⁹ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014, h. 14

1. Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri (*self confidence*), kontrol diri (*self control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).
2. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (*self concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai (*value*) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Dalam kompetensi individu ini dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu terdiri atas: kompetensi *threshold* atau dapat disebut kompetensi minimum yaitu kompetensi dasar yang harus

dimiliki oleh seseorang, misalnya kemampuan pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan membaca dan menulis, dan kompetensi *differentiating* yaitu kompetensi yang membedakan seseorang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah dengan karyawan lainnya, misalnya seseorang yang memiliki orientasi motivasi tinggi biasanya yang diperhatikan adalah pada tujuan melebihi apa yang ditargetkan oleh perusahaan dalam standar kerja.¹⁰

2.1.2.2 Kompetensi jabatan

Kompetensi jabatan (*job competency*), mempunyai peran yang sangat penting dan harus mendapat perhatian serius dari pihak manajemen karena aspek kompetensi jabatan ini sudah banyak digunakan sebagai dasar penentu posisi jabatan calon karyawan atau calon pejabat yang akan menduduki suatu jabatan.

Seseorang agar mendapatkan kinerja tinggi secara maksimal seharusnya antara kompetensi individu yang dimiliki, harus sesuai atau cocok dengan dengan kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini akan mengakibatkan atau terjadi kecocokan (*matching*) dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya.

¹⁰ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014, h. 14-15

Berdasarkan standar kompetensi pada kompetensi jabatan, tercakup dua komponen yang mendasar, yaitu kompetensi utama dan kompetensi pendukung, rinciannya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kompetensi utama, merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu, agar pelaksanaan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka harus meliputi berikut ini:
 - a. Akuntabilitas
 - b. Organisasi pembelajar
 - c. Menentukan masalah dan memecahkannya
 - d. Manajemen perubahan
 - e. Perencanaan stratejik
 - f. Manajemen kebijakan
 - g. Manajemen kinerja (*management for result*)
 - h. Manajemen kualitas pelayanan
 - i. Manajemen kerjasama
2. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk membantu atau mendukung terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu, yang terdiri atas:

¹¹ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014, h.43-45

- a. Komunikasi
- b. Teknologi informasi

2.1.2.3 Kompetensi Dalam Perspektif Islam

Islam berpandangan bahwa kepemimpinan itu melingkupi semua level kehidupan, dalam menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan berbasis pada tanggungjawab atas sebuah aktivitas yang telah dilakukan. Sifat dan kualitas tanggungjawab yang dimaksud dalam konsep Islam disesuaikan dengan pekerjaan serta kompetensi masing-masing pemimpin. Atas dasar inilah konsep kepemimpinan Islam sangat memperhatikan pentingnya kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki para pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, “Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya”. Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat; Rasulullah bersabda “Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari)

Rasulullah memerintahkan kepada umat manusia agar beretos kerja yang tinggi, yang mana selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari al-Qur'an seperti yang disebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثْقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334). Oleh karena itu umat manusia secara keseluruhan dapat memperbaiki kinerjanya secara baik sehingga dapat memperbaiki kualitas SDM kita menuju SDM yang unggul dan dapat bersaing dengan dunia.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.¹²

¹² Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014, h.141.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso bahwa ‘tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.’. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu, dan sebagainya) maupun eksternal (yaitu: peran stakeholder, kondisi social, politik, ekonomi dan budaya).

Partisipasi dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya keterwakilan masyarakat secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya ada 4 (empat) macam, yaitu:¹³

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

¹³ Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014, h.153

3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

2.1.2.1 Partisipasi Dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan dan partisipasi umat. Al Qur'an memberi petunjuk bahwa kesepakatan dan partisipasi umat diperoleh dengan cara syura atau musyawarah. Ini sesuai dengan QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dengan syura, Islam sesungguhnya memiliki prinsip partisipasi public yang sangat mendasar. Prinsip fundamental ini merupakan nilai dasar bagi tata kehidupan bernegara menurut Islam. Adapun bentuk, struktur, tata kerja, sistem rekrutmen yang terkait dengan implementasi prinsip syura, diserahkan kepada umat, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makna syura diperluas bukan hanya proses penyerapan partisipasi

masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan melalui musyawarah. Dalam konteks penyelenggaraan Negara, itu bermakna sebagai hak rakyat untuk menetapkan kepala Negara, berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan umum (seperti APBN/APBD), berpartisipasi dalam mewujudkan peraturan yang membawa kemaslahatan orang banyak, serta berarti juga hak rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.¹⁴

Syura atau musyawarah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diimplementasikan dalam tiga bentuk yang berbeda. Pertama, musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang ada kaitannya dengan persoalan yang dimusyawarahkan. Kedua, musyawarah melibatkan perwakilan-perwakilan masyarakat dalam persoalan yang tidak mungkin melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, musyawarah dengan para ahli dalam memecahkan persoalan-persoalan khusus, memang tidak begitu saja bisa disamakan dengan model parlemen yang ada sekarang, namun dari segi fungsinya adalah berorientasi untuk kebaikan bersama.

14

<http://www.pesantreniq.or.id/index.php/artikel/350-syura-dan-partisipasi-dalam-pemilu> diakses pada 24 Juli 2019

2.1.3 Teknologi Informasi

2.1.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi (*information Technology*) dalam *Oxford English Dictionary* edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Menurut Haag dan Keen, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim/menyebarkan informasi.¹⁵

2.1.4.2 Peranan Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan

Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public*

¹⁵ Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011, h.1

service), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.¹⁶

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti : G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemelihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa Negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislative

¹⁶ Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Tangerang:Mitra Wacana Media, 2011, h.15

pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat.

2.1.4.3 Teknologi Informasi Dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang tersirat dari firman Allah dalam Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 33, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahman:33)

Beberapa ahli menjelaskan kata *sulthan* dengan berbagai macam arti, ada yang mengartikan dengan kekuatan, dan kekuasaan, ada pula yang mengartikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. Maka yang dimaksud darinya adalah kelapangan dan kedalaman ilmu.

Abdul Al-Razzaq Naufal dalam bukunya *Al-Muslimun wa al-Ilm al-Hadis*, mengartikan kata “*sulthan*” dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa, bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya memadai.

Ayat tersebut anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Namun Al Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistis, sebab betapapun baiknya rencana namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah *sulthan*, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa

penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*account-tability*) yang berarti keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan. Menurut pandangan Dwiyanto, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga.¹⁷ Ini berarti bahwa diperlukan adanya pertanggungjawabandari pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai eksekutor kebijakan terhadap warga masyarakat guna mengetahui sudah sejauh mana pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah pemberian laporan dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja yang telah

¹⁷ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.131.

dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauh mana pemerintah memberi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran.

Lembaga Administrasi Negara RI memberikan pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat(*benefits*), dan dampak (*impact*).¹⁸

¹⁸ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.132-133

1. *Inputs*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumberdaya manusia, material, waktu, teknologis, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
2. *Output*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program dan atau aktivitas.
3. *Outcome*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
4. *Benefit*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. *Impact*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Lebih diperjelas oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam berikut¹⁹:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada entitas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.4.2 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ellwood terdapat beberapa dimensi akuntabilitas public yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017, h.133-134

²⁰ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017, h.135

1. Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*); berhubungan dengan penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
2. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*); berhubungan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
3. Akuntabilitas proses; berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
4. Akuntabilitas program; berhubungan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
5. Akuntabilitas kebijakan; berhubungan dengan pertanggung-jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR/DPRD terhadap masyarakat luas.

Mardiasmo menambahkan dimensi akuntabilitas finansial, yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.²¹ Berkaitan dengan itu, dimensi akuntabilitas finansial menurut Rasul, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial, yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program, yang dapat diartikan bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan

²¹ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017, h.133

program yang bermutudan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan, bahwa lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.
5. Akuntabilitas finansial, merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

2.1.4.3 Aspek-aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut:²²

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General of British Columbia*, yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan public saat ini, akuntabilitas tidak melihat pada *input* ataupun *output*, melainkan kepada *outcome*.

²² Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017, h.137

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggungjawab.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Solihin, indikator minimum terlaksananya akuntabilitas terdiri atas berikut ini:²³

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

2.1.4.5 Perangkat Indikator Akuntabilitas

Perangkat indicator untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi public menurut Mardiasmo mencakup hal berikut:

²³ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017, h.138

1. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan.
2. Adanya mekanisme pertanggungjawaban.
3. Adanya laporan tahunan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban periodic.
5. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara.
6. Adanya sistem pengawasan.
7. Adanya mekanisme *reward and punishmen*.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 pasal (1), dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

2.1.4.6 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Pada prinsipnya tanggungjawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu saja sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat seperti ayat 164 surat Al An'am

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telahdiperbuatnya”

Akan tetapi perbuatan individu itu merupakan suatu gerakan yang dilakukan seorang pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Tanggungjawab bukan hanya terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi meluas sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh , semuanya akan meninggalkan bekas sampai kapanpun. Dari bisa dilihat bahwa Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula tanggungjawabnya. Seorang pemimpin negara

bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya dan rakyatnya. Hal ini ditegaskan Allah yang artinya.; “Wahai orang-orang mukmin peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”(QS. At Tahrir:6) Sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah saw : “ Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya..”(Al Hadit)

Tanggungjawab vertikal ini bertingkat-tingkat tergantung levelnya. Kepala keluarga, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan kepala negara, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Seroang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki dirinya, keluarganya dan semua yang menjadi tanggungannya.

Pemimpin dalam level apapun akan mempertanggungjawabannya dihadapan Allah atas semua perbuatannya disamping seluruh apa yang terjadi pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya perilaku dan keadaan rakyat tergantung kepada pemimpinnya. Sebagaimana rakyat juga akan dimintai pertanggungjawabannya ketika memilih seorang pemimpin. Bila mereka memilih pemimpin yang bodoh

dan tidak memiliki kapabilitas serta akseptabilitas sehingga kelak pemimpin itu akan membawa rakyatnya ke jurang kedurhakaan rakyat juga dibebani pertanggungjawaban itu.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

2.1.5.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau

prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:²⁴

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

²⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2014, h. 7-8

6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang

tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) sehingga jika terjadi selisih dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandate untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.

16. Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

2.1.5.2 Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :²⁵

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa

²⁵ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat., 2016, h.48

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur perangkat desa yang dimaksud terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- 2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. Kepala Seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desayang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.6 Dana Desa

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PPNo. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.²⁶

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aditya Nugroho Jati (2015)	Kompetensi Aparatur Desa dalam Menghadapi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Anggaran Desa Toapaya Selatan)	Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dapat dilihat melalui pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat. Kompetensi aparatur desa di Desa Toapaya Selatan dalam pengakolasi dana desa telah tepat sasaran, namun untuk pemerataan pembangunan di Desa Toapaya belum berjalan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah. Persamaan dengan penelitian ini adalah

²⁶ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat., 2016, h.32

			pada variabel Kompetensi Aparatur Desa. Perbedaanannya yaitu penelitian ini ada variabel independen Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2.	Fecky M. Pangemanan, dkk.(2017)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek atau studi kasusnya. Dalam penelitian tersebut yang dijadikan studi kasus atau objek adalah Penyusunan APBDesa.
3.	Chandra Putra Immanuel Momuat (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil dari

		pada Kabupaten Minahasa Tenggara)	<p>penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKMD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi dan perbedaannya terdapat pada variabel Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKMD).</p>
4.	Nurul Nadila Idward (2017)	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas</p>	<p>Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda tersebut menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan</p>

		Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)	teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Peresamaan dari penelitian ini adalah pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, adapun perbedaannya terdapat pada variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Daerah sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
5.	Linda Widowati, dkk. (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kurang akuntabel disebabkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengaturan struktur kerja yang berdasarkan senioritas, kualitas sumberdaya aparatur yang rendah,

			<p>budaya kerja pemerintah desa yang belum berbasis data dan budaya masyarakat yang pasif serta akses informasi yang terbatas. Terdapat variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat dipengaruhi oleh variabel kualitas sumberdaya aparatur, budaya masyarakat yang masih pasif, dan terkait pemanfaatan informasi.</p>
6.	Larastika Medianti (2018)	<p>Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan)</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel independen Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel dependen Pengelolaan Dana Desa. Ada perbedaan dalam penelitian yang peneliti tulis yaitu pada variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi.</p>

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh penulis, kemudian akan diuji berdasarkan faktanya melalui penelitian. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

- Ho 1 Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- Ho 2 Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- Ho 3 Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hipotesis : 1

Berdasarkan uraian teori-teori yang sudah dijelaskan diatas secara umum diketahui bahwa kompetensi berhubungan dengan sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang diperolehnya. Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan pekerjaan (sudah bekerja). Sebaliknya, apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula.

Pada penelitian penelitian Aditya Nugroho Jati (2015), “Kompetensi Aparatur Desa dalam Menghadapi Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Anggaran Desa Toapaya Selatan)” dengan hasil bahwa kompetensi aparatur desa dapat dilihat melalui pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat. Kompetensi aparatur desa di Desa Toapaya Selatan dalam pengakolasi dana desa telah tepat sasaran, namun untuk pemerataan pembangunan di Desa Toapaya belum berjalan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah. Penelitian Larastika Medianti (2018), “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan)” dengan hasil bahwa variabel independen Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel dependen Pengelolaan Dana Desa dengan pengujian statistik terhadap kompetensi aparatur yang menghasilkan standar deviasi sebesar 0,43, respon terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan kriteria sangat baik karena berada pada range 84% - 100% yaitu 85,85%. Artinya kompetensi aparatur berpengaruh positif. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan:

Ho 1 Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis : 2

Berdasarkan teori partisipasi diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu

kegiatan. Tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Pada penelitian Fecky M. Pangemanan, dkk.(2017), "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017" dengan hasil bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa. Dengan hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap penyusunan APBDesa sebesar 0,891. Artinya partisipasi masyarakat berpengaruh positif, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan:

Ho 2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis : 3

Berdasarkan teori diatas teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim/menyebarkan informasi. Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data

administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public service*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.

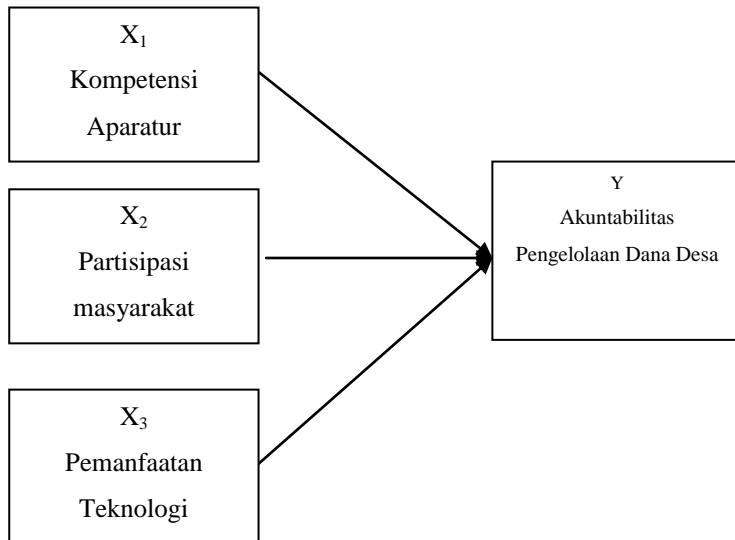
Selanjutnya dari penelitian Nurul Nadila Idward (2017), “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)” dengan hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda tersebut menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil uji koefisien determinasi dari model regresi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,641 yang berarti 64,1% menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas dan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian Chandra Putra Immanuel Momuat (2016), “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Kabupaten Minahasa Tenggara)” dengan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan

Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKMD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,672 atau 67,2% yang berarti ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh variabel lain. Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan:
Ho 3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritik

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pikiran teoritik yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan kerangka berfikir, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Kerangka pemikiran yang diolah, 2019

Dari bagan diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode Kuantitatif juga dapat disebut sebagai metode *discovery* karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru.²⁷

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 23 desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

²⁷ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.53-54.

²⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan ke-27, Bandung: Alfabeta, 2016, h.61

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel³⁰, dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu.³¹ Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesra, dan kepala dusun.
- b. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
- c. Desa yang diambil adalah desa yang berstatus desa tertinggal.

²⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan ke-27, Bandung: Alfabeta, 2016, h.62

³⁰ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan ke-27, Bandung: Alfabeta, 2016, h.63

³¹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan ke-27, Bandung: Alfabeta, 2016, h.64

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Selain data, ada juga pengertian lain yang mempunyai kemiripan dengannya adalah fakta. Biasanya orang sering menggunakan dua istilah ini dalam satu pengertian yang sama padahal masing-masing mempunyai konsep tersendiri.³²

3.3.1 Sumber Data

Sumber data merupakan proses atau alat untuk mengukur, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).³³ Data dipenelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada kepala desa, perangkat pengelola dana desa, tokoh masyarakat.

³² Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis : Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 2014, h.84.

³³ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.284.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat angka, atau bisa juga bukan data angka, namun bisa dikuantifikasikan. Data-data tersebut untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus kerja statistik.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁵ Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* alat atau cara untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variable yang diukur dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala *Likert* mempunyai nilai dari sangat positif

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*

³⁵ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT.Refika Aditama, h.141.

sampai sangat negative, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut.³⁶

Sangat Setuju	: 5
Setuju	: 4
Netral	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

3.4 Variabel dan Indikator Penelitian

3.4.1 Variabel

Variabel merupakan sesuatu yang di dalamnya terdapat atribut-atribut, unit-unit, dimensi-dimensi atau nilai-nilai yang beragam. Menurut Nazir menyebutkan bahwa variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Menurut Sugiyono, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.³⁷

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.142.

³⁷ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.211-212.

terjadinya perubahan pada variabel lain, dan variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel dependen.³⁸ Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan Variabel dependen (Y) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur.³⁹ Dalam penelitian ini terdapat empat variabel diantaranya variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (variabel independen) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (variabel dependen). Variabel kompetensi aparatur indikator atau dimensinya diperoleh pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Khaeril Wahyu Perdana “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”. Dalam penelitian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur

³⁸ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.217.

³⁹ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.84.

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dalam penelitian tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan dan kesopanan. Jadi penulis menggunakan aspek-aspek tersebut sebagai acuan dalam penelitian.

Untuk variabel partisipasi masyarakat penulis mengambil dari penelitian terdahulu Khaeril Wahyu Perdana “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”. Dalam penelitian tersebut variabel partisipasi masyarakat memiliki beberapa aspek yaitu terlibat dalam menyusun rencana anggaran, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam mengawasi dan melaporkan, memberikan penghargaan. Maka dari itu penulis menjadikan aspek-aspek tersebut sebagai indikator dalam penelitian ini.

Kemudian untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi penulis mengambil penelitian terdahulu dari Khaeril Wahyu Perdana “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”. Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian

tersebut menggunakan 4 indikator yaitu adanya software pendukung, ketersediaan jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, dan proses terkomputerisasi, maka dari itu penulis menggunakan indikator tersebut untuk penelitian. Dan untuk variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa, penulis mengambil indikator dari penelitian terdahulu yaitu, kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kesukupan informasi dan ketepatan penyampaian laporan.

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kompetensi aparaturnya (X ₁) Independen	Kemampuan aparaturnya dalam (memahami peraturan pengelolaan dana desa)mengelola keuangan	- Pemahaman - keahlian teknis - pelatihan - inisiatif dalam bekerja - kode etik - kepegawaian	Skala likert
Partisipasi masyarakat (X ₂) Independen	bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan	- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa - Mengusulkan rencana anggaran - terlibat dalam mengawasi dan	Skala likert

		<ul style="list-style-type: none"> melaporkan memberikan penilaian dan penghargaan 	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃) Independen	Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (<i>public service</i>), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya software pendukung ketersediaan jaringan internet dimanfaatkan sesuai ketentuan proses terkomputerisasi Mempunyai website desa 	Skala likert
Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) Dependen	pemberian laporan dan pengungkapan (<i>disclosure</i>) atas aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> kejujuran dan keterbukaan informasi kepatuhan dalam pelaporan kesesuaian prosedur kecukupan informasi ketepatan penyampaian laporan 	Skala likert

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses penghimpun atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian.⁴⁰ Supaya kesimpulan menjadi valid, maka data yang diperoleh sebaiknya diuji terlebih dahulu kelayakannya. Untuk mengukur kelayakan data dengan menggunakan uji validitas, dan realibilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heterokedastisitas, uji multikolo-nieritas serta uji hipotesis.

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas merupakan salah satu ciri penting dalam penelitian keperilakuan karena dengan validitass dan reliabilitas sebuah pembuatan skala atau alat ukur yang dibuat oleh peneliti untuk mengukur variabelnya dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas. Validitas dan reliabilitas memberikan gambaran keakuratan dan ketepatan pengukuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap variabel-variabel yang diukur.⁴¹

⁴⁰ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.333.

⁴¹ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.80.

Untuk memahami, berikut adalah penjelasan dari Uji Validitas dan Reliabilitas:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁴²

2. Uji Reliabilitas

Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.⁴³

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau persyaratan analisis yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan statistik inferensial, khususnya statistik parametrik. Uji Asumsi Klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas,

⁴² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-VII, 2013, h.52

⁴³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-VII, 2013, h.47

dan Uji Multikolonieritas, dari ketiga Uji tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal).⁴⁴

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Wijaya, Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak sama untuk pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang paling baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model, atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴⁵

3.5.2.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara mendeteksi

⁴⁴ Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h.54.

⁴⁵ Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h.66.

adanya multikolonieritas adalah dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

3.5.2.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri(deskripsi).⁴⁶

Model regresi penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 \dots + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y jika satu unit perubahan pada variabel bebas (variabel X_1, X_2, X_3)

X_1 = Kompetensi Aparatur

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

⁴⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2015, h.84

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Koefisien determinasi Adjusted R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.⁴⁷

3.5.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikan secara silmutan antara variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Selanjutnya, untuk menguji hipotesis pada uji F ini

⁴⁷ Koncoro M, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2009,h.100

digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Quick look: bila nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 10%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis yang sebagai alternative yang menyatakan bahwa serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada F table, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.5.3.3 Uji T

t Test atau t Student (disebut juga uji t) merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. t Test merupakan salah satu bentuk statistic parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio.⁴⁸

Adapun cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Quick look: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 10% maka H_0 yang bi= dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain

⁴⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012 h. 179.

⁴⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.61

kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

- b. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila statistic t hasil lebih tinggi dibandingkan nilai t table, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Pancur. Pada Kecamatan Pancur terdapat 23 desa, dimana dari 23 desa 7 diantaranya dijadikan sebagai sampel. Data diperoleh melalui kuesioner yang telah disebar kepada responden penelitian, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keunagan, aparat pengelolaa dana desa, dan BPD. Dari 7 desa yang dijadikan sampel yaitu Desa Jeruk, Desa Doropayung, Desa Warugunung, Desa Wuwur, Desa Kedung, Desa Johogunung, Desa Kalitengah, peneliti telah menyebarkan sebanyak 100 kuesioner dengan tingkat pengembalian yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Distribusi Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	100	100
2.	Kuesioner yang kembali	75	75
3.	Kuesioner yang tidak kembali	25	25
4.	Kuesioner yang dapat diolah	75	75

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 100 kuesioner yang disebar sebesar 75 kuesioner kembali dan dapat diolah dan sekitar 25 kuesioner yang tidak kembali.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Responden

4.2.1.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian untuk 75 orang responden berdasarkan jenis kelamin aparat pengelola dana desa dapat dirunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Kategori Jenis Kelamin Responden

Kategori	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
A	Laki-laki	57	76
B	Perempuan	18	24
Jumlah		75	100

Dari tabel 4.2 diatas karakteristik responden aparatur pengelola dana desa berdasarkan jenis kelamin diketahui sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebesar 76%, sedangkan untuk perempuan sebesar 24%.

4.2.1.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Penelitian untuk 75 orang responden berdasarkan jenis kelamin aparat pengelola dana desa dapat dirunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Kategori Jenjang Pendidikan Responden

Kategori	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
A	SD	10	13,3
B	SMP	8	10,7
C	SMA	46	61,3
D	S1	11	14,7
Jumlah		75	100

Dari tabel 4.3 diatas karakteristik responden aparatur pengelola dana desa berdasarkan jejang pendidikan diketahui sebagian besar adalah S1 sebesar 14,7%, SMA sebesar 61,3%, SMP sebesar 10,7%, dan SD sebesar 13,3%. Mayoritas pendidikan aparatur pengelola dana desa di Kecamatan Pancur adalah SMA.

4.2.2 Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data berdasarkan sampel angket yang telah disebar:

4.2.2.1 Kompetensi Aparatur

Tabel 4.4

Mean, Median, Modus

Statistics						
	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6
N Valid	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4,3067	4,1600	3,8933	3,8000	4,2000	4,1733
Median	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,51918	,46615	,53457	,61512	,40269	,38108
Variance	,270	,217	,286	,378	,162	,145
Minimum	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	323,00	312,00	292,00	285,00	315,00	313,00

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data yang dapat dinyatakan valid sejumlah 75 sampel orang yang dapat dianalisis datanya. Missing disini menunjukan banyaknya data yang salah sehingga dapat diketahui tidak ada data yang salah. Mean ini adalah nilai rata-rata, rata-rata pada table tersebut untuk KA1(4,3067), KA2 (4,1600), KA3 (3,8933), KA4 (3,8000), KA5 (4,2000), dan KA6 (4,1733). Median adalah nilai tengah, nilai tengah pada tabel diatas setiap itemnya adalah empat yaitu (setuju). Modus pada tabel diatas pada setiap item adalah empat.

4.2.2.2 Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.5

Mean, Median, Modus

Statistics					
	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5
† Valid	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,2800	3,9733	3,9333	3,4667	3,5333
Median	4,0000	4,0000	4,0000	3,0000	4,0000
Mode	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Std. Deviation	,48099	,51918	,66441	,60030	,57735
Variance	,231	,270	,441	,360	,333
Minimum	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	321,00	298,00	295,00	260,00	265,00

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa data yang dapat dinyatakan valid sejumlah 75 sampel orang yang dapat dianalisis datanya. Missing disini menunjukan banyaknya data yang salah sehingga dapat diketahui tidak ada data yang salah. Mean ini adalah nilai rata-rata, rata-rata pada table tersebut untuk PM1(4,2800), PM2 (3,9733), PM3 (3,9333), PM4 (3,4667), dan PM5 (3,5333). Median adalah nilai tengah, nilai tengah pada tabel diatas itemnya adalah empat yaitu (setuju) kecuali pada PM4 adalah 3 yaitu ragu-

ragu. Modus pada tabel diatas pada PM1 (4), PM2 (4), PM3 (4), PM4 (3), dan PM5 (4).

4.2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 4.6

Mean, Median, Modus

Statistics						
	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	TI6
N Valid	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4,4933	4,1467	4,1467	4,4400	4,2667	3,6400
Median	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,52949	,67169	,65126	,49973	,44519	,72857
Variance	,280	,451	,424	,250	,198	,531
Minimum	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	2,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	337,00	311,00	311,00	333,00	320,00	273,00

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data yang dapat dinyatakan valid sejumlah 75 sampel orang yang dapat dianalisis datanya. Missing disini menunjukan banyaknya data yang salah sehingga dapat diketahui tidak ada data yang salah. Mean ini adalah nilai rata-rata, rata-rata pada table tersebut untuk TI1(4,4933), TI2 (4,1467), TI3 (4,1467), TI4 (4,4400), TI5 (4,2667), dan TI6 (3,6400). Median adalah nilai tengah, nilai tengah pada tabel diatas

itemnya adalah empat yaitu (setuju) kecuali TI1 adalah 5 yaitu sangat setuju. Modus pada tabel diatas pada TI1 (5), TI2 sampai TI6 (4).

4.2.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel 4.7

Mean, Median, Modus

Statistics							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
N Valid	75	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,6533	4,4133	4,4267	4,4000	4,1200	4,1467	3,7467
Median	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,47911	,49575	,49792	,49320	,75265	,76571	,59487
Variance	,230	,246	,248	,243	,566	,586	,354
Minimum	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	349,00	331,00	332,00	330,00	309,00	311,00	281,00

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa data yang dapat dinyatakan valid sejumlah 75 sampel orang yang dapat dianalisis datanya. Missing disini menunjukkan banyaknya data yang salah sehingga dapat diketahui tidak ada data yang salah. Mean ini adalah nilai rata-rata, rata-rata pada table tersebut untuk A1(4,6533), A2 (4,4133), A3 (4,4267), A4 (4,4000), A5 (4,1200), A6 (4,1467) dan A7 (3,7467). Median adalah nilai tengah, nilai tengah pada tabel diatas

itemnya adalah empat yaitu (setuju) kecuali A1 adalah 5 yaitu sangat setuju. Modus pada tabel diatas pada A1 (5), A2 sampai A7 (4).

4.3 Analisis Data

Sebelum data dianalisis data diuji terlebih dahulu untuk meyakinkan data yang bersangkutan baik atau tidak. Uji data-data yang dimaksud adalah :

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji masing-masing item pertanyaan dari setiap variabel penelitian. Suatu variabel dikorelasikan dengan nilai total masing-masing butir pertanyaan dengan menggunakan metode korelasi person. Kemudian nilai korelasi dibandingkan dengan uji signifikan dengan taraf 50%. Apabila korelasi lebih besar dari 50% maka nilai korelasi dari masing-masing butir tersebut dinyatakan valid.

Dari hasil validitas didapatkan tiga variabel, yaitu variabel kompetensi aparatur (X1), partisipasi masyarakat (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), akuntabilitas (Y). Nilai korelasi dibandingkan dengan dengan r_{tabel} , r_{tabel} dicari pada signifikan 0,5 dengan $(n) = 100$ atau $df = 75$, maka di dapat r_{tabel} sebesar 0,227, jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka angket dikatakan valid, begitu juga sebaliknya. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka angket dikatakan tidak valid.

Tabel 4.8

Validitas variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas

Validitas	No soal	Validitas		Keterangan
Kompetensi Aparatur	KA1	0,227	0,642	Valid
	KA2	0,227	0,632	Valid
	KA3	0,227	0,266	Valid
	KA4	0,227	0,279	Valid
	KA5	0,227	0,414	Valid
	KA6	0,227	0,274	Valid
Partisipasi Masyarakat	PM1	0,227	0,581	Valid
	PM2	0,227	0,247	Valid
	PM3	0,227	0,313	Valid
	PM4	0,227	0,243	Valid
	PM5	0,227	0,234	Valid
Teknologi Informasi	TI1	0,227	0,794	Valid
	TI2	0,227	0,592	Valid
	TI3	0,227	0,689	Valid
	TI4	0,227	0,599	Valid
	TI5	0,227	0,581	Valid
	TI6	0,227	0,467	Valid
Akuntabilitas	A1	0,227	0,779	Valid
	A2	0,227	0,611	Valid
	A3	0,227	0,572	Valid
	A4	0,227	0,595	Valid
	A5	0,227	0,604	Valid

	A6	0,227	0,619	Valid
	A7	0,227	0,541	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Dari tabel 4.8 Terlihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ semua. Maka dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan angket valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable apabila memiliki *Croancbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas untuk masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas menggunakan program SPSS, adapun hasil perhitungannya:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,831	6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,687	5	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,888	6	Reliabel
Akuntabilitas	0,910	7	Reliabel

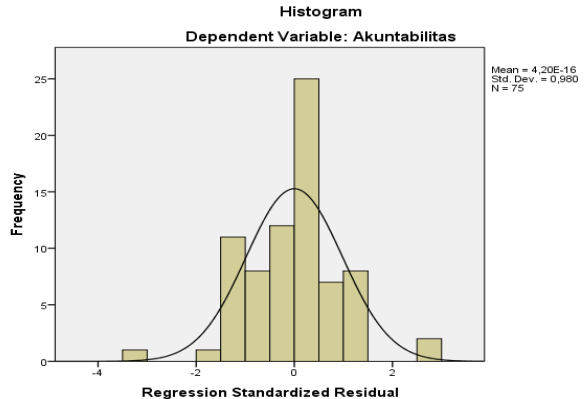
Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Dari tabel 4.9 Diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel kompetensi aparatur sebesar 0,831, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,687, koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,888, dan koefisien akuntabilitas sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas $> 0,6$ maka dinyatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

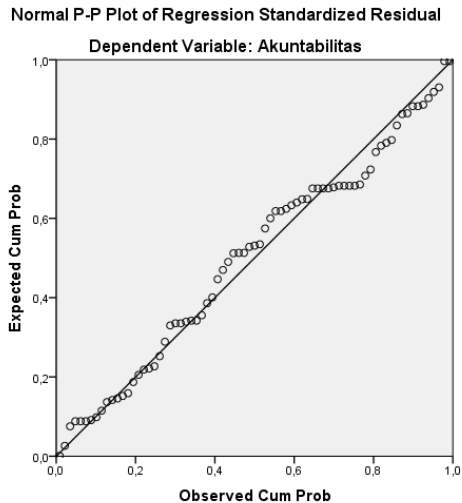
4.3.3.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan dua kali uji normalitas, yaitu dengan menganalisis grafik dan uji statistic. Grafik yang dihasilkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Grafik Uji Normalitas



Gambar 4.2

Grafik Normal Plot

Dalam grafik histogram dan grafik normal plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal dan penyebarannya tidak terlalu jauh sehingga tidak menyalahi asumsi normalitas. Adapun uji static dapat dilihat pada hasil uji dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) berikut:

Tabel 4.10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22074223
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,083
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Berdasarkan hasil uji tersebut nilai test statistic sebesar 0,087, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstan varians. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan pengujian menggunakan metode *Glejset* dengan ketentuan apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi

heteroskedastisitas dan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,240	2,286		1,855	,068
Kompetensi	-,089	,079	-,140	-1,130	,262
Partisipasi	,035	,097	,047	,359	,720
Teknologi	-,040	,066	-,083	-,612	,543

a. Dependent Variable: abs_RES2

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari uji glejser diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai signifikansi untuk variabel kompetensi aparatur sebesar 0,262, untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,720, dan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,543. Ketiga variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas atau data statistic tersebut tidak mengandung adanya asumsi klasik heteroskedastisitas.

4.3.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas disini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai VIF. Jika $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas dan apabila $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,240	2,286		1,855	,068		
Kompetensi	-,089	,079	-,140	-1,130	,262	,891	1,122
Partisipasi	,035	,097	,047	,359	,720	,786	1,272
Teknologi	-,040	,066	-,083	-,612	,543	,743	1,346

a. Dependent Variable: abs_RES2

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan hasil VIF <10,00

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13

Hasil Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,183	3,713		1,127	,264
Kompetensi	,231	,128	,150	1,799	,076
Partisipasi	-,016	,158	-,009	-,104	,917
Teknologi	,811	,107	,693	7,596	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas, dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

$$Y = 4,183 + 0,231 X_1 - 0,016 X_2 + 0,811 X_3$$

Diketahui:

X_1 = Kompetensi Aparatur

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$a = 4,183$ adalah bilangan konstan

$b_1 = 0,231$ adalah besarnya koefisien regresi X_1 (Kompetensi Aparatur), yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,231 atau 23% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_2 dan X_3) konstan. Jika variabel kompetensi aparatur meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Jika variabel Kompetensi Aparatur memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas.

$b_2 = -0,016$ adalah besarnya koefisien regresi X_2 (Partisipasi Masyarakat), yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar 1 satuan akan menurunkan Y sebesar 0,016 atau 1,6% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_1 dan X_3) konstan. Jika variabel partisipasi masyarakat meningkat, maka akuntabilitas akan menurun. Jika variabel Partisipasi Masyarakat memiliki arah hubungan negatif terhadap akuntabilitas.

$b_3 = 0,811$ adalah besarnya koefisien regresi X_3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi), yang berarti setiap peningkatan penambahan X_3 sebesar 1 pemanfaatan akan meningkatkan Y

sebesar 0,811 atau 81,1% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_1 dan X_2) konstan. Jika variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Jika variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas.

4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya kemampuan kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa dilihat dari hasil berikut ini:

Tabel 4.14

Koefisien Determinasi Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,562	,543	2,26717

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Kompetensi, Partisipasi

Berdasarkan data diatas diketahui R Square sebesar 0,562, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 56,2% dan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

4.4.3 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel Independen atau bebas yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 4.15

Tabel Uji Signifikan Simultan Kompetensi Aparatur,
Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam Menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	467,401	3	155,800	30,311	,000 ^b
	Residual	364,946	71	5,140		
	Total	832,347	74			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Teknologi, Kompetensi, Partisipasi

Dari tabel tersebut diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 30,311 > F_{tabel} 3,12$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y .

4.4.4 Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4.16

Uji Signifikan Parameter Kompetensi Aparatur,
Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam Menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,183	3,713		1,127	,264
Kompetensi	,231	,128	,150	1,799	,076
Partisipasi	-,016	,158	-,009	-,104	,917
Teknologi	,811	,107	,693	7,596	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa:

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Kompetensi Aparatur (X_1) $t_{hitung} = 1,799 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,76 > 0,05$ artinya kompetensi aparatur tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas.
- Hipotesis yang kedua untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) $t_{hitung} = -0,104 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,917 > 0,05$ artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas.
- Hipotesis yang ketiga untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) $t_{hitung} = 7,596 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,000 > 0,05$ artinya pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

4.5 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 75 responden, untuk memberikan informasi terkait pengaruh variabel yang terdapat dalam penelitian Pengaruh Kompetensi Aparatur (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 75 responden dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ semua. Kemudian hasil reliabilitas pada penelitian ini pun reliable yaitu dibuktikan dengan semua

koefisien lebih besar dari 0,60 maka semua pernyataan dinyatakan reliable.

Uji R (Koefisien Determinasi) Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini dapat diketahui dari nilai R Square sebesar 0,562, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 , X_2 , X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 56,2%. Sedangkan 43,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain. Hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa $Y = 4,183 + 0,231 X_1 - 0,016 X_2 + 0,811 X_3$ dengan nilai konstan sebesar 4,183. Hasil analisis Uji F (Uji Signifikansi Simultan) diketahui bahwa ada pengaruh yang simultan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 terhadap Y dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 30,311 > F_{tabel} 3,12$. Hasil analisis Uji t berdasarkan hipotesis dapat diketahui bahwa:

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Kompetensi Aparatur (X_1) $t_{hitung} = 1,799 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig 0,76 > 0,05$ artinya kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Dalam penelitian Arif Widyatama, dkk (2017), yang menjelaskan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Kompetensi aparatur merupakan keahlian masing-masing individu yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang

baik. Kompetensi aparatur merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Berdasarkan penelitian kompetensi aparatur desa tergolong masih lemah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner yang menjelaskan bahwa tidak semua aparatur paham akan pengelolaan dana desa.

- Hipotesis yang kedua untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X_2)
 $t_{hitung} = -0,104 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,917 > 0,05$ artinya partisipasi masyarakat tidak terdapat pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Dalam penelitian Rie Vay Pakpahan(2018), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat saat kegiatan perencanaan masih tergolong rendah dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kemauan perwakilan masyarakat, sosialisasi dan hubungan BPD dengan aparat pemerintahan desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat melalui BPD menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi dalam kenyataannya BPD tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini penyusunan anggaran dana desa. Hal tersebut dikarenakan BPD mempunyai pekerjaan lain diluar posisi mereka sebagai BPD dan juga jarak tempuh ke balai desa atau balai pertemuan yang jauh.

- Hipotesis yang ketiga untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) $t_{hitung} = 7,596 > t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,000 > 0,05$ artinya pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Dalam penelitian Chandra Putra Immanuel Momuat(2016), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,

Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan dana desa, yang mana dapat mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian pemerintahan desa sudah mendapat akses internet dan peralatan komputer yang memadai. Oleh sebab itu setiap desa sudah mempunyai website desa untuk memberikan informasi mengenai program-program desa dan setiap desa menggunakan aplikasi sistem keuangan yang memudahkan aparatur pengelola dana desa untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis diketahui untuk variabel Kompetensi Aparatur $t_{hitung} = 1,799 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,76 > 0,05$ yang artinya Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Dari hasil analisis untuk variabel partisipasi masyarakat $t_{hitung} = -0,016 < t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,917 > 0,05$ yang artinya Partisipasi Masyarakat berpengaruh tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Dari hasil analisis untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi $t_{hitung} = 7,596 > t_{tabel} = 2,628$ dan $sig\ 0,000 > 0,05$ yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

5.2 Saran

a. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparatur pengelola dana desa dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga memberi kepercayaan terhadap masyarakat agar program-program desa bisa terealisasi dengan bantuan masyarakat.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas penelitian ini dengan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana yang mana belum dibahas dalam penelitian ini seperti, pelatihan, tingkat pendidikan dan ketaatan laporan keuangan. Peneliti selanjutnya juga bisa menambah sampel atau desa yang akan diteliti.

5.3 Keterbatasan Penelitian

5.3.1 Keterbatasan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kecamatan Pancur, yang mana hanya terbatas pada desa dengan kategori desa tertinggal, sehingga tidak keseluruhan di Kecamatan

Pancur. Dengan demikian hasil penelitian ini mungkin akan berbeda jika dilakukan ditempat yang berbeda.

5.3.2 Keterbatasan dalam objek

Penelitian ini hanya meneliti kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.3.3 Keterbatasan responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 responden yang diambil dari aparat pengelola dana desa.

Dari beberapa keterbatasan yang peneliti sebutkan di atas, maka dapat dikatakan inilah keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan. Meskipun banyak hambatan dan keterbatasan, namun penulis bersyukur penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.

5.4 Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna dan bermanfaat.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya, Nur, *Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Riau*, JOM (Vol. 4 No. 2- Oktober 2017)
- Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Cetakan VII, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Hoesada, Jan, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Juliastuti, Ayu, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dprd Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*, Universitas Negeri Padang, 2013
- Koncoro M, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2009
- Kurniawan, Albert , *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis : Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Larastika, Medianti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap*

Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB (Volume 1 Edisi 1, Januari-Juni 2018)

Lukito, Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2014

Mada, Sarifudin, dkk, *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*, Universitas Sam Ratulangi, 2017

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2014

Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011

Nugroho, Aditya Jati, *Kompetensi Aparatur Desa dalam Menghadapi UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus tentang Pengelolaan Anggaran Desa Toapaya Selatan)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rahmawati, Arini Ayu, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

Rully, Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT.Refika Aditama

Sarjono, Haryadi, dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2014

Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan ke-27, Bandung: Alfabeta, 2016

....., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sutrisno, *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pekanbaru*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widyatama, Arif, dkk, *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (Vol. 02 No.2), 2017

Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2017

Werimon, Simson, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) (*Study Empiris Di Provinsi Papua*), Universitas Diponegoro, 2005

Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat., 2016

Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI
MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA
(STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN PANCUR
KAB.REMBANG)**



Oleh:
Nurkhasanah
1505046067

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Yth. Bapak/Ibu
Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa.....
Di Tempat

Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian
Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, peneliti:

Nama : Nurkhasanah
NIM : 1505046067
Program Studi : Akuntansi Syariah
Alamat : Desa Gedongmulyo RT 01/ RW 02
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Semua jawaban yang dipilih adalah benar. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini.

Semarang, April 2018

Peneliti

Nurkhasanah
NIM.1505046067

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data
dibawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Umur :(Tahun)

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
☐ S1 ☐ Lainnya

Jabatan/ Pangkat :

Lama bekerja di posisi
saat ini :

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Peneliti mengharapakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan memberi tanda ceklist (v) pada table yang sudah tersedia dengan memilih:

Untuk alternative jawaban pertanyaan kode 1, 2, 3, 4, 5

1. SS = Sangat Setuju
2. S = Setuju
3. N = Netral
4. TS = Tidak Setuju
5. STS = Sangat Tidak Setuju

A. Kompetensi Aparatur

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa					
2.	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan					
3.	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
4.	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan					
5.	Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
6.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					

B. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa					
2.	Masyarakat mengusulkan rencana Anggaran alternatif untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah					
3.	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
4.	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran					
5.	Masyarakat memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa					

	dalam pengelolaan anggaran dana desa					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

C. Pemanfaatan Tehnologi Informasi

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		SS	S	N	TS	STS
1.	Di tempat kerja saya memiliki <i>software</i> atau aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti: <i>Microsoft excel</i> , <i>Microsoft word</i> , dan lain sebagainya dalam mendukung pekerjaan					
2.	Jaringan internet dengan kapasitas yang memadai telah terpasang di kantor desa					
3.	Di tempat saya bekerja jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antara aparatur dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
4.	Proses awal transaksi hingga pembuatan laporan di pemerintahan desa dilakukan					

	secara terkomputerisasi					
5.	Pengelolaan data menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku					
6.	Di tempat saya bekerja menggunakan website untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat					

D. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		SS	S	N	TS	STS
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah					
2.	Laporan keuangan yang kami sajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai					
3.	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan					

	pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan					
4.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap					
5.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa					
6.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa					
7	Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa					

Dokumentasi Pengisian Kuesioner



Jawaban Responden

No	Kompetensi Aparat					Skor	Partisipasi Masyarakat					Skor	Pemanfaatan Teknologi Informasi					Skor	Akuntabilitas							Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	5	5	5	30	5	2	5	2	2	16	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	35
2	4	4	4	5	5	26	4	3	5	4	4	20	5	5	5	5	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
3	5	5	4	5	5	29	4	3	4	4	3	18	5	3	4	5	5	26	5	5	5	5	3	3	3	29
4	5	5	4	5	5	29	5	4	5	4	4	22	5	5	5	5	4	28	5	5	5	5	4	5	5	34
5	4	4	3	3	4	22	3	3	3	4	3	16	3	4	3	5	4	22	5	5	4	5	3	3	3	28
6	3	3	4	3	4	21	5	5	5	4	3	22	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	3	3	3	26
7	4	5	5	5	5	29	5	4	5	4	3	21	5	5	4	5	5	28	5	5	5	5	5	5	4	34
8	4	4	4	4	4	24	5	4	5	4	4	22	4	4	4	5	4	25	5	4	4	4	4	5	4	30
9	4	4	4	4	4	24	5	4	5	4	4	22	5	5	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	3	3	4	22	5	4	5	5	4	23	5	3	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	4	34
11	4	4	4	4	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	4	34
12	4	5	5	4	5	28	4	4	5	4	4	21	5	5	5	4	4	28	5	5	5	5	4	4	4	32
13	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	5	5	30	5	5	4	4	4	22	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	35
15	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	4	4	29
16	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	29	5	5	5	4	5	5	4	33
17	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	4	34
18	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	29	4	4	4	4	5	5	4	30
19	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	4	34
20	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	19	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	4	34
21	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	19	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	4	34

2 2	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	3	1 9	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	5	5	5	4	3 4
2 3	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	5	5	5	4	3 4
2 4	4	4	4	4	4	4	2 4	5	5	5	5	4	2 4	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	5	5	5	4	3 4
2 5	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	3	1 9	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	5	5	5	4	3 4
2 6	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	4	5	5	4	3 3
2 7	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	5	5	5	5	5	4	2 9	5	5	5	5	5	5	4	3 4
2 8	5	4	4	4	4	5	2 6	4	5	4	3	3	1 9	4	4	4	4	4	4	2 4	5	4	5	4	5	5	4	3 2
2 9	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	4	4	2 8
3 0	5	4	4	4	4	5	2 6	4	5	4	4	3	2 0	4	4	4	4	4	4	2 4	5	4	5	4	5	5	4	3 2
3 1	5	4	4	4	4	5	2 6	5	5	4	3	3	2 0	4	4	4	4	4	4	2 4	5	4	5	4	5	5	4	3 2
3 2	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	4	4	4	4	4	4	2 4	5	5	5	5	5	5	5	3 5
3 3	5	5	5	5	5	4	2 9	4	4	4	3	3	1 8	4	4	4	4	4	3	2 3	5	5	5	5	4	4	3	3 1
3 4	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	4	4	4	4	4	4	2 4	5	5	5	5	5	5	5	3 5
3 5	4	4	4	4	4	4	2 4	4	4	5	4	4	2 1	4	3	3	4	4	3	2 1	4	4	4	4	4	4	4	2 8
3 6	3	3	3	3	3	4	2 0	4	4	4	4	3	1 9	4	4	4	4	4	3	2 3	4	4	4	4	4	4	4	2 8
3 7	4	4	4	4	4	5	2 5	4	4	4	4	3	1 9	4	4	4	4	4	4	2 4	5	5	4	4	5	5	3	3 1
3 8	4	3	4	4	5	5	2 5	4	4	5	5	3	2 1	5	5	5	4	4	4	2 7	5	4	4	4	4	4	4	2 9
3 9	5	5	5	4	4	4	2 7	4	4	4	4	3	1 9	4	4	4	4	4	3	2 3	4	4	4	4	4	4	3	2 7
4 0	4	4	4	3	4	4	2 3	4	4	4	4	3	1 9	5	4	4	4	4	3	2 4	5	5	5	5	4	4	4	3 2
4 1	5	4	4	3	4	4	2 4	5	4	4	4	4	2 1	5	4	4	4	4	3	2 4	5	5	4	5	4	4	4	3 1
4 2	5	4	4	3	4	4	2 4	4	4	4	4	4	2 0	5	4	4	5	4	3	2 5	5	5	4	5	4	4	4	3 1
4 3	4	4	4	3	4	4	2 3	4	4	4	4	4	2 0	5	4	4	5	4	3	2 5	5	4	4	5	4	4	4	3 0
4 4	4	4	3	3	4	4	2 2	4	4	3	3	3	1 7	5	4	4	5	4	3	2 5	5	4	4	5	4	4	4	3 0
4 5	4	4	3	3	4	4	2 2	4	4	3	3	3	1 7	5	4	4	5	4	3	2 5	5	4	4	5	4	4	4	3 0
4 6	4	4	3	3	4	4	2 2	4	4	3	4	3	1 8	5	4	4	4	4	3	2 4	5	4	5	5	4	4	4	3 1

47	5	4	3	3	4	4	23	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	3	23	5	4	5	5	4	4	4	31
48	5	5	4	4	5	4	27	5	4	3	4	3	19	4	4	4	4	4	3	23	5	4	4	4	4	4	4	29
49	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4	3	19	4	3	3	4	4	3	21	5	4	4	4	4	4	4	29
50	4	4	3	3	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	4	3	3	3	25
51	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	3	3	3	25
52	4	4	3	3	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	3	3	3	25
53	4	4	4	3	4	4	23	4	3	3	3	3	16	4	4	4	4	4	2	22	5	4	4	4	4	4	3	28
54	4	4	4	4	4	4	24	5	4	3	4	4	20	4	3	3	4	4	2	20	4	4	4	4	3	3	3	25
55	4	4	4	4	4	4	24	5	4	3	4	3	19	5	4	4	4	4	3	24	5	4	4	4	4	4	3	28
56	4	4	4	4	4	4	24	5	4	3	4	4	20	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4	4	4	4	4	29
57	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	3	4	18	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	3	3	4	4	22	4	4	3	3	4	18	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	4	3	3	3	25
59	4	4	3	3	4	4	22	4	4	3	4	4	19	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	4	3	3	3	25
60	5	4	4	4	4	4	25	5	4	3	4	4	20	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	3	3	25
61	5	4	3	3	4	4	23	4	4	3	4	4	19	5	4	4	5	4	4	26	5	5	5	4	4	4	4	31
62	5	4	4	4	5	4	26	4	4	4	4	4	20	5	4	4	5	4	4	26	5	5	4	4	4	4	4	30
63	5	4	4	4	5	4	26	5	4	4	4	4	21	4	4	4	5	4	3	24	4	4	4	4	4	4	4	28
64	5	4	4	3	4	4	24	5	3	4	4	4	20	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	3	3	25
65	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	3	3	17	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	4	3	3	3	25
66	4	4	3	3	4	4	22	4	4	3	3	3	17	4	3	3	4	4	4	22	4	4	4	4	3	3	3	25
67	5	5	3	3	4	4	24	4	4	3	3	3	17	4	3	3	4	4	4	22	4	4	4	4	3	3	3	25
68	4	4	3	3	4	4	22	4	3	4	3	3	17	4	3	3	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	3	27
69	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	3	27
70	5	5	4	4	4	4	26	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	3	27
71	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	3	3	25

$\frac{7}{2}$	4	4	4	4	4	$\frac{2}{4}$	4	4	4	3	3	$\frac{1}{8}$	4	4	4	4	3	$\frac{2}{3}$	4	4	4	4	3	3	3	$\frac{2}{5}$
$\frac{7}{3}$	4	4	4	4	4	$\frac{2}{4}$	4	4	4	3	3	$\frac{1}{8}$	4	4	4	4	3	$\frac{2}{3}$	4	4	4	4	3	3	3	$\frac{2}{5}$
$\frac{7}{4}$	5	5	4	4	5	$\frac{2}{7}$	5	4	4	4	3	$\frac{2}{0}$	5	4	4	5	4	$\frac{2}{6}$	5	4	4	4	5	5	4	$\frac{3}{1}$
$\frac{7}{5}$	5	4	4	4	4	$\frac{2}{5}$	4	3	3	3	3	$\frac{1}{6}$	4	4	4	5	4	$\frac{2}{5}$	5	5	5	4	5	5	4	$\frac{3}{3}$

OUTPUT SPSS 22

Tanggapan Responden mengenai Item Pertanyaan Masing-masing

Variabel Kompetensi Aparatur (X1)

Statistics

	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6
N Valid	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4,3067	4,1600	3,8933	3,8000	4,2000	4,1733
Median	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,51918	,46615	,53457	,61512	,40269	,38108
Variance	,270	,217	,286	,378	,162	,145
Minimum	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	323,00	312,00	292,00	285,00	315,00	313,00

KA1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	2	2,7	2,7	2,7
4,00	48	64,0	64,0	66,7
5,00	25	33,3	33,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	3	4,0	4,0	4,0
4,00	57	76,0	76,0	80,0
5,00	15	20,0	20,0	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KA3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	15	20,0	20,0	20,0
4,00	53	70,7	70,7	90,7
5,00	7	9,3	9,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KA4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	23	30,7	30,7	30,7
4,00	44	58,7	58,7	89,3
5,00	8	10,7	10,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KA5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	60	80,0	80,0	80,0
5,00	15	20,0	20,0	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KA6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	62	82,7	82,7	82,7
5,00	13	17,3	17,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)**Statistics**

	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5
N Valid	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,2800	3,9733	3,9333	3,4667	3,5333
Median	4,0000	4,0000	4,0000	3,0000	4,0000
Mode	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Std. Deviation	,48099	,51918	,66441	,60030	,57735
Variance	,231	,270	,441	,360	,333
Minimum	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	321,00	298,00	295,00	260,00	265,00

PM1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	1	1,3	1,3	1,3
4,00	52	69,3	69,3	70,7
5,00	22	29,3	29,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

PM2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,3	1,3	1,3
3,00	8	10,7	10,7	12,0
4,00	58	77,3	77,3	89,3
5,00	8	10,7	10,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

PM3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	19	25,3	25,3	25,3
4,00	42	56,0	56,0	81,3
5,00	14	18,7	18,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

PM4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	2	2,7	2,7	2,7
3,00	38	50,7	50,7	53,3
4,00	33	44,0	44,0	97,3
5,00	2	2,7	2,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

PM5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,3	1,3	1,3
3,00	35	46,7	46,7	48,0
4,00	37	49,3	49,3	97,3
5,00	2	2,7	2,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)**Statistics**

	TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	TI6
N Valid	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4,4933	4,1467	4,1467	4,4400	4,2667	3,6400
Median	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,52949	,67169	,65126	,49973	,44519	,72857

Variance	,280	,451	,424	,250	,198	,531
Minimum	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	2,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	337,00	311,00	311,00	333,00	320,00	273,00

TI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	1	1,3	1,3	1,3
4,00	36	48,0	48,0	49,3
5,00	38	50,7	50,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

TI2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	12	16,0	16,0	16,0
4,00	40	53,3	53,3	69,3
5,00	23	30,7	30,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

TI3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	11	14,7	14,7	14,7
4,00	42	56,0	56,0	70,7
5,00	22	29,3	29,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

TI4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	42	56,0	56,0	56,0
5,00	33	44,0	44,0	100,0
Total	75	100,0	100,0	

TI5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	55	73,3	73,3	73,3
5,00	20	26,7	26,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

TI6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	4	5,3	5,3	5,3
3,00	26	34,7	34,7	40,0
4,00	38	50,7	50,7	90,7
5,00	7	9,3	9,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Statistics

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
N Valid	75	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,6533	4,4133	4,4267	4,4000	4,1200	4,1467	3,7467
Median	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Std. Deviation	,47911	,49575	,49792	,49320	,75265	,76571	,59487
Variance	,230	,246	,248	,243	,566	,586	,354
Minimum	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Maximum	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum	349,00	331,00	332,00	330,00	309,00	311,00	281,00

A1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	26	34,7	34,7	34,7
5,00	49	65,3	65,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

A2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	44	58,7	58,7	58,7
5,00	31	41,3	41,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

A3

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	43	57,3	57,3	57,3
5,00	32	42,7	42,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

A4

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4,00	45	60,0	60,0	60,0
5,00	30	40,0	40,0	100,0
Total	75	100,0	100,0	

A5

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	17	22,7	22,7	22,7
4,00	32	42,7	42,7	65,3
5,00	26	34,7	34,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

A6

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	17	22,7	22,7	22,7
4,00	30	40,0	40,0	62,7
5,00	28	37,3	37,3	100,0

Total	75	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

A7

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	25	33,3	33,3	33,3
4,00	44	58,7	58,7	92,0
5,00	6	8,0	8,0	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Validitas X1

Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	Kompetensi
KA1	Pearson Correlation	1	,632**	,266*	,279*	,414**	,274*	,642**
	Sig. (2-tailed)		,000	,021	,015	,000	,017	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
KA2	Pearson Correlation	,632**	1	,449**	,490**	,547**	,298**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,009	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75

KA3	Pearson Correlation	,266*	,449**	1	,756**	,477**	,424**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,021	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
KA4	Pearson Correlation	,279*	,490**	,756**	1	,600**	,496**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,015	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
KA5	Pearson Correlation	,414**	,547**	,477**	,600**	1	,476**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
KA6	Pearson Correlation	,274*	,298**	,424**	,496**	,476**	1	,636**
	Sig. (2-tailed)	,017	,009	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Kompetensi	Pearson Correlation	,642**	,767**	,781**	,838**	,771**	,636**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas X2

Correlations

		PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	Partisipasi
PM1	Pearson	1	,247*	,313**	,257*	,234*	,583**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,033	,006	,026	,044	,000
	N	75	75	75	75	75	75
PM2	Pearson	,247*	1	,151	,347**	,274*	,581**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,033		,195	,002	,018	,000
	N	75	75	75	75	75	75
PM3	Pearson	,313**	,151	1	,429**	,235*	,676**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,006	,195		,000	,043	,000
	N	75	75	75	75	75	75
PM4	Pearson	,257*	,347**	,429**	1	,575**	,791**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,026	,002	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75
PM5	Pearson	,234*	,274*	,235*	,575**	1	,698**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,044	,018	,043	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75
Partisipasi	Pearson	,583**	,581**	,676**	,791**	,698**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Validitas X3

		Correlations						
		TI1	TI2	TI3	TI4	TI5	TI6	Teknologi
TI1	Pearson Correlation	1	,592**	,689**	,599**	,581**	,467**	,794**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TI2	Pearson Correlation	,592**	1	,877**	,530**	,590**	,468**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TI3	Pearson Correlation	,689**	,877**	1	,588**	,702**	,568**	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TI4	Pearson Correlation	,599**	,530**	,588**	1	,680**	,441**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TI5	Pearson Correlation	,581**	,590**	,702**	,680**	1	,508**	,809**
	Sig. (2-tailed)							
	N							

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
TI6	Pearson Correlation	,467**	,468**	,568**	,441**	,508**	1	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Teknologi	Pearson Correlation	,794**	,847**	,917**	,761**	,809**	,736**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75

Validitas Y

	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
A3	Pearson Correlation	,572**	,699**	1	,616**	,655**	,649**	,552**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
A4	Pearson Correlation	,595**	,696**	,616**	1	,415**	,415**	,488**	,701**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
A5	Pearson Correlation	,604**	,553**	,655**	,415**	1	,977**	,703**	,899**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
A6	Pearson Correlation	,619**	,550**	,649**	,415**	,977**	1	,735**	,905**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75

A7	Pearson Correlation	,541 **	,452 **	,552 **	,488 **	,703 **	,735 **	1	,801**
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,779 **	,771 **	,817 **	,701 **	,899 **	,905 **	,801 **	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	75	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,831	,836	6

Reliabilitas X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	75	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,687	,688	5

Reliabilitas X3

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	75	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,888	,897	6

Reliabilitas Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	75	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,910	,915	7

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22074223
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,083
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Heterokedasititas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,240	2,286		1,855	,068
Kompetensi	-,089	,079	-,140	-	,262
Partisipasi	,035	,097	,047	1,130	,262
				,359	,720

Teknologi	-,040	,066	-,083	-,612	,543
-----------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: abs_RES2

Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Model				t	Sig.		
1 (Constant)	4,240	2,286		1,855	,068		
Kompetensi				-			
	-,089	,079	-,140	1,130	,262	,891	1,122
Partisipasi	,035	,097	,047	,359	,720	,786	1,272
Teknologi	-,040	,066	-,083	-,612	,543	,743	1,346

a. Dependent Variable: abs_RES2

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,562	,543	2,26717

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Kompetensi, Partisipasi

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	467,401	3	155,800	30,311	,000 ^b
Residual	364,946	71	5,140		
Total	832,347	74			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Teknologi, Kompetensi, Partisipasi

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,183	3,713		1,127	,264
Kompetensi	,231	,128	,150	1,799	,076
Partisipasi	-,016	,158	-,009	-,104	,917
Teknologi	,811	,107	,693	7,596	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Nurkhasanah |
| 2. Tempat & Tanggal Lahir | : Rembang, 22 Oktober 1997 |
| 3. Alamat Rumah | : Desa Gedongmulyo RT 01
RW 02, Kec.
Lasem, Kab. Rembang |
| 4. Hp | : 089503388445 |
| 5. E-mail | : nukha2210@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. TK Mardisiwi 1, lulus tahun 2003
 - b. SD N 1 Gedongmulyo. Lulus tahun 2009
 - c. SMP N 1 Lasem, lulus tahun 2012
 - d. SMK Umar Fatah Rembang, lulus tahun 2015
2. Pendidikan Non Formal :
 - a. Ma'had Walisongo Semarang, tahun 2015-2016
 - b. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jarakah Tugu Semarang tahun 2016-2019

Semarang, 9 Juli 2019

Nurkhasanah
NIM: 1505046067